

# Menuju Etika Ekonomi<sup>1</sup> dalam Perspektif Islam

*Muhammad Akhyar Adnan*

*The article below investigates Islamic economics. The study on Islamic economics includes at least two main problems, (1) how the ethics of business from Islam viewpoint, and (2) how the ethics of economics according to Islam perspective. According to the author that the ethics of economics is not only in Islam, but also in other religion. But, Islam involves ethics. Islamic ethics sources from verified teaching and universal doctrine, besides, it can be an alternative economical recovery solution. For realizing Islamic ethics regarding economics, it needs socializing and implementing by discourse and the Islamic subjects and technological supporting.*

**Kata kunci:** *etika, ekonomi, Islam dan bisnis.*

Sulit dipungkiri klaim yang mengatakan bahwa kerusakan perekonomian sebuah komunitas, bahkan mungkin sebuah sistem perekonomian, dapat berawal dari ketika perekonomian atau sebuah sistem ekonomi menjauhi atau dijauhkan dari nilai-nilai etika. Sebaliknya, menguatnya sebuah perekonomian atau sistem perekonomian tidak lepas dari sejauh mana sistem atau perekonomian itu diletakkan seiring dengan nilai-nilai etika, yang dalam bentuk lebih konkret dapat diwujudkan dalam format hukum dan aturan main yang lebih baku dan ditaati oleh seluruh warga komunitas itu.

Jatuh banggunya sebuah sistem perekonomian, entah yang bernama fasisme, sosialisme atau komunisme [Mannan, 1986], bahkan mungkin sistem ekonomi Islam sendiri yang konon pernah mengalami kejayaan sampai dengan abad ke 14 [Mannan, 1986], tidak mustahil merupakan efek

menjauhnya nilai-nilai etika dari praktik ekonomi yang berlang-sung ketika itu.

Seiring dengan bangkitnya kembali apa yang disebut sebagai sistem perekonomian Islami sejak sekitar tiga atau empat dasa warsa belakangan ini, baik di tingkat dunia, maupun di negara Indonesia ini, menjadi menarik untuk dikaji (a) bagaimana Islam memandang aspek etika dalam bisnis, dan sekaligus (b) bagaimana – menurut kacamata Islam – etika ekonomi (termasuk dalam bisnis dan akuntansi tentunya) harus diformulasikan dengan tujuan agar dapat mengawal pertumbuhan perekonomian yang diyakini berasaskan syariah itu, dan sekaligus menjamin survabilitas sistem ini hingga akhir zaman nanti, insya Allah.

Tulisan ini diarahkan untuk menjawab kedua persoalan di atas. Kalau sistem

---

<sup>1</sup> Pengertian “ekonomi” di sini meliputi pula aspek bisnis dan akuntansi sekaligus.

ekonomi ini dibiarkan berkembang begitu saja, dan tanpa pengawalan pada aspek etika, maka tidak mustahil sejarah akan berulang. Keindahan konsepsi akan berhenti pada tatanan wacana, lalu secara perlahan keindahan dan kecanggihan konsepsi itu akan tergerus oleh tidak ditaatinya nilai-nilai etika yang melandanya, dan pada gilirannya akan tenggelam oleh persoalan berat yang ditimbulkan, lalu pada akhirnya mati seperti beberapa sistem yang pernah ada dan bahkan mungkin pernah menunjukkan keberhasilannya. Tulisan ini disusun dengan lebih dahulu membahas Islam dan Etika Bisnis, kemudian dilanjutkan dengan kajian Sumber Etika. Barulah setelah ini dibahas Etika Bisnis Islami diiringi dengan diskusi mengenai Sosialisasi dan Implementasi, dan akhirnya ditutup dengan Ikhtitam.

### Islam dan Etika Bisnis

Adalah sulit mengukur secara pasti, agama mana yang paling dekat hubungannya dengan etika. Bila masing-masing agama yang sekarang ada dan dikenal ditanyakan perihal ini, maka mungkin masing-masing agama akan mengklaim bahwa agama merekalah yang paling dekat hubungannya dengan etika dan semacamnya. Namun, lepas dari kemungkinan saling klaim itu, dari sudut pandang agama Islam sangat amat jelas hubungan antara agama dan etika yang dalam bahasa "Islam" lebih dikenal dengan "*al-akhlaqul karimah*".

Sebuah hadits Nabi Muhammad saw. yang sangat populer amat tegas menjelaskan kedekatan Islam dengan etika, ketika beliau bersabda bahwasanya: "*Sesungguhnya aku diutus untuk menyempumakan akhlaq yang mulia*". Lebih dari itu, berbagai hikayah dan sirah tentang

Rasul terakhir ini juga menegaskan betapa beliau selalu disanjung oleh kawan dan lawan lantaran tingginya akhlaq yang beliau tunjukkan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Amat sangat banyak hadits, sejarah hingga sirah beliau yang dapat dirujuk yang menunjukkan betapa Nabi Muhammad saw dan ajaran Islam yang menjadi misi da'wahnya sangat tidak mungkin dipisahkan dari hal-hal yang berkaitan dengan etika atau *akhlaqul karimah*. Bahkan mungkin keseluruhan riwayat hidup beliau, bila harus diberi topik atau tema singkat, maka niscaya tema yang paling tepat untuk menggambarkannya adalah etika.

Kesemuanya itu, membuktikan dengan gamblang betapa Islam tidak pernah bisa dilepaskan dari etika. Dalam ungkapan lain, barangkali dapat dikatakan bahwa Islam adalah tatanan etika itu sendiri untuk segala aspek kehidupan manusia, mulai dari lahir hingga meninggal dunia, dan untuk jenis manusia apapun suku dan mungkin warna kulitnya, dimanapun tinggalnya dan dalam zaman apapun hidupnya.

### Sumber Etika

Islam memang sarat dengan nilai-nilai etika. Namun harus diakui bahwa etika juga bukan monopoli ajaran Islam. Artinya, ajaran-ajaran agama lain, atau mungkin kelompok-kelompok komunitas yang tidak beragama Islam juga mengenal apa yang dimaksudkan dengan etika. Oleh karena itu, etika – sampai dengan tahapan ini – mungkin dapat diklasifikasikan menjadi etika umum yang berasal dari berbagai nilai, dan etika Islam yang seutuhnya mendasarkan nilainya berdasarkan ajaran Islam.

Etika secara umum didefinisikan oleh Beekun [1997, 2] sebagai himpunan prinsip-prinsip moral yang dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Lebih jauh Beekun [1997, 2-19] berpendapat, bahwa etika individu ditentukan oleh tiga faktor utama, yakni: (pertama) tafsir hukum, (kedua) faktor-faktor organisasi, dan (ketiga) faktor-faktor individual.

Di negara-negara sekuler, menurut Beekun [1997, 2] tafsiran hukum didasari oleh standar dan nilai-nilai yang bersifat kontemporer dan tidak tetap. Oleh karenanya – kata Beekun pula – sesuatu yang hari ini dianggap wajar dan boleh, mungkin berubah menjadi sebaliknya suatu hari nanti. Dicontohkan misalnya di Amerika Serikat, pada mulanya dibolehkan secara hukum pembedaan (diskriminasi) terhadap minoritas dan kaum perempuan, namun pada akhirnya pembedaan tersebut juga dilarang. Ini bermakna bahwa dimungkinkan perubahan standar etika akibat etika itu dibangun atas dasar interpretasi atas hukum yang berlaku yang notabene lahir dari kesepakatan dan interaksi berbagai kepentingan manusia yang melingkupinya.

Selain berdasarkan tafsir hukum, konsepsi nilai etika juga dapat berasal dari pengaruh organisasi dan atau profesi tertentu. Hal tersebut sudah menjadi sebuah kelaziman dalam dunia industri bahwa sebuah perusahaan atau profesi tertentu merumuskan sejumlah kode etik yang dijadikan acuan berperilaku bagi segenap warga organisasi atau profesi itu. Nilai-nilai etika kemudian dipahami dari rumusan semacam itu. Betapapun ada sejumlah kesamaan antara kode etik sebuah perusahaan atau profesi tertentu dengan perusahaan atau profesi lainnya, tentu juga mungkin ada perbedaan. Ini menyebabkan lahirnya perbedaan pemahaman etika dari

seseorang dari orang lain, yang mungkin berasal perusahaan dan atau profesi berbeda.

Dalam konteks pengaruh individual, terdapat sedikitnya enam faktor yang dapat menyebabkan lahirnya pemahaman dan sekaligus perilaku etika seseorang, yakni (a) tingkatan perkembangan moral, (b) nilai-nilai personal dan kepribadian, (c) pengaruh keluarga, (d) pengaruh teman atau lingkungan, (e) pengalaman hidup, dan (f) faktor-faktor situasional [Beekun, 1997, 5-8].

Bila dilihat dari sudut pandang Islam, maka secara substansi terdapat pandangan mengenai sumber nilai-nilai etika tersebut. Tidak seperti nilai-nilai etika umum yang dapat berubah sesuai dengan perkembangan hukum yang dibuat oleh manusia. Etika Islam bersifat mendasar dan oleh karenanya tidak mungkin mengalami perubahan semata-mata oleh karena interpretasi hukum saja. Etika Islam bersumber dari ajaran inti Islam yang berbasiskan Al-Qur'an dan As-sunnah. Selain mendasar, lengkap, terpadu juga permanen dalam arti berlaku abadi sepanjang masa dan berlaku universal untuk siapa saja, apapun ras dan kulitnya.

Sistem etika umum, Beekun [1997, 10]<sup>2</sup> menjelaskan bahwa pada dasarnya ada enam sistem etika yang mendominasi pola pikir munculnya pola etika itu sendiri, yakni relativisme, utilitarianisme, universalisme, hak atau kepentingan individu, distribusi yang berkeadilan, dan hukum Tuhan.

---

<sup>2</sup> Lihat juga Muhammad [2004] yang juga mengutip dan mengulas hal yang sama dalam bukunya Etika Bisnis Islami.

Faham relativisme menekankan bahwa tidak ada sesuatu, apalagi bersifat universal yang dapat dipakai untuk menentukan sebuah kegiatan itu bersifat etis atau tidak. Oleh karena itu, dimungkinkan bahwa setiap orang, atau setiap kelompok masyarakat mempunyai standar etika masing-masing, yang berbeda dengan orang atau kelompok masyarakat lainnya. Dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa sebuah tatanan etika terikat dengan norma di daerah mana etika itu berada. Hal tersebut dapat dibayangkan oleh karenanya bahwa pola pikir seperti ini akan berpotensi menimbulkan banyak masalah dalam aplikasinya, karena etika menjadi terikat oleh faktor kultural dan kedaerahan sekaligus (*culturally and locally bound*).

Agak sedikit berbeda dengan faham relativisme yang sangat berorientasi kepentingan-pribadi, faham utilitarianisme menekankan pada aspek perhitungan *cost* dan *benefit*. Artinya sesuatu akan dianggap etis manakala kalkulasi *benefit* kegiatan tersebut melebihi *cost*-nya. Faham ini sangat jelas mengandung banyak permasalahan dalam tataran implementasi karena, ketidaksamaan orang dalam memandang *cost* dan *benefit*. Artinya, *benefit* bagi seseorang bisa menjadi *cost* bagi yang lain, dan sebaliknya. Oleh karena itu, tatanan nilai etis menjadi sangat subjektif dan justru membahayakan ketenangan masyarakat. Beekun sendiri melakukan *counter* terhadap faham ini dengan merujuk kepada Al-Qur'an Surat 18:46.

Faham berikutnya – menurut Beekun – yang mewarnai pemikiran etika bisnis adalah universalisme. Universalisme menekankan hasil dari sebuah keputusan dan memfokuskan kepada niat dari sebuah keputusan atau kegiatan. Secara khusus, faham ini diwarnai oleh mazhab Kant dalam prinsip *categorical imperative*. Ini meliputi

dua hal mendasar, yakni pertama: seseorang harus memilih bertindak hanya bila menginginkan orang lain memandang dan berbuat sama dengannya dalam situasi yang sama, dan kedua: pihak lain harus dipertimbangkan sebagai akhir segala sesuatu, bermartabat dan terhormat, dan sama sekali bukan semata-mata sebagai alat saja.

Sesungguhnya pendekatan ini juga menarik dan terkesan humanis. Namun, sekali lagi faham atau pendekatan ini tidak lepas dari potensi masalah, ketika niat – kata Yusuf Al-Qaradhowi [dalam Beekun, 1997, 12] tidak akan bisa merubah hukum sesuatu yang bersifat bathil menjadi halal, dengan kata lain: “*good intentions do not make the haram acceptable*”.

Pendekatan lainnya adalah berkaitan dengan hak (*rights*) yang menekankan nilai tunggal, yakni *liberty* atau kebebasan. Sebuah keputusan dan tindakan dianggap etis manakala keduanya dilandasi oleh kebebasan individu yang memastikannya kebebasan memilih. Pendekatan ini secara implisit memberikan seseorang hak-hak moral yang tidak dapat ditawar-tawar.

Seperti halnya berbagai pendekatan yang sudah dibahas dimuka, pendekatan ini juga rawan akan sejumlah masalah, misalnya penyalahgunaan. Sejumlah orang boleh jadi akan mendesak haknya atas orang lain, akibatnya terjadilah ketidaksamaan (*inequity*) antara sekelompok orang dan kelompok lainnya. Dalam kacamata Islam, ini tentu tidak boleh terjadi. Bahkan dalam beragama pun, seseorang tidak dibolehkan memaksakan keyakinannya kepada siapapun, sebagai ditegaskan Allah dalam Qur'an Surat Al-Baqarah 256.

Pendekatan lainnya adalah keadilan distributif yang juga menekankan nilai

tunggal dalam bentuk keadilan dan kepastian bahwa harta dan manfaat sesuatu dibagi secara sama rata. Sekali lagi hal ini terkesan ideal, karena Islam adalah agama yang secara substantif selalu mengejar dan menegakkan keadilan. Namun perlu diingat bahwa Islam tidak mengenal keadilan buta (*blind justice*), melainkan keadilan yang mempertim-bangkan keseimbangan.

Pendekatan etika yang terakhir adalah pendekatan yang berbasis kepada hukum Tuhan, dalam arti merujuk kepada wahyu dan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab suci. Pendekatan seperti ini juga terkesan ideal, namun tentu bukan tanpa masalah. Berbicara tentang wahyu yang sudah dituliskan dalam Kitab suci, maka harus ada kehati-hatian, khususnya bila wahyu tersebut terdapat dalam Kitab suci selain Al-Qur'an yang memang tidak ada jaminan dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para pemegang kitab suci tersebut. Sejauh ini – di mata Muslim – hanya al-Qur'anlah yang dijamin oleh Allah keaslian dan kebebasan dari upaya campur tangan manusia dalam merubah isinya. Sedangkan kitab suci lain, sulit dijamin keasliannya.

Selain itu, dalam memahami petunjuk yang diberikan Allah, selain melalui wahyu yang diturunkan melalui para Nabi dan RasulNya, Islam juga mengenalkan apa yang disebut sebagai ayat-ayat kauniyyah, yakni tanda-tanda dan ilmu Allah yang diberikan lewat alam terkembang dan tidak secara khusus diwahyukan lewat para Nabi dan Rasul. Seperti halnya kebenaran dan nilai-nilai etis yang sudah diatur dalam ayat qauliyyah, maka seyogianya, kebenaran dan nilai-nilai etis yang digambarkan melalui ayat kauniyyah mestinya juga mendapat porsi yang memadai sebagai sumber nilai-nilai etis.

## Sistem Etika Islami

Sistem etika Islami, betapapun mungkin di dalamnya dapat ditemukan beberapa kesamaan dengan nilai-nilai etika yang pernah dikenal dalam sistem lain, adalah berbeda dengan sistem nilai etika yang muncul dengan berbagai pendekatan yang dibahas dalam sub-bab di atas. Perbedaan tersebut sangat mendasar, baik dilihat dari sumbernya, maupun dari substansi materinya. Dalam uraian di atas sudah disinggung bahwa nilai-nilai etika dalam konteks umum, pada dasarnya berasal dari sejumlah faktor seperti interpretasi hukum, pengaruh organisasi dan faktor-faktor individual. Oleh karena itu, sangat dimungkinkan terjadinya perbedaan nilai etika berdasarkan tempat dan mungkin waktu. Tetapi yang juga jelas adalah bahwa nilai-nilai etika tersebut diturunkan dari interaksi manusia, dan seakan-akan lepas sama sekali dari nilai-nilai transendental dan atau ilahiyah. Hal ini sangat berbeda dengan nilai-nilai etika bila dilihat dari perspektif Islam.

Dalam Islam, sudah sangat jelas adanya pedoman baku yang berlaku umum dan universal, baik dari dimensi lokasi maupun dimensi waktu. Artinya, nilai-nilai tersebut dapat dipastikan sama antara satu kota, negeri atau bahkan negara dengan kota, negeri atau negara lainnya dimanapun di muka bumi ini. Begitu pula bila dilihat dari dimensi waktu, etika bisnis Islami tidak akan berbeda karena perbedaan waktu, periode atau zaman.

Dalam konteks ini, Syed Nawab Haider Naqvi [1994] mengajukan apa yang disebutnya sebagai pokok-pokok aksioma etis<sup>3</sup>. Ini meliputi (a) tauhid, (b) keseimbangan (*equilibrium / al-'adl wal ihsan*), (c) kehendak bebas (*free will / al-ikhtiyar*), dan (d) pertanggungjawaban (*responsibility / fardh*)<sup>4</sup>.

Tauhid adalah inti ajaran Islam yang bersifat sangat fundamental dan sekaligus memberikan efek sangat sangat jauh atas segala bentuk peribadatan dan sekaligus kegiatan muamalah. Artinya seluruh apapun yang disebut Islam atau Islami itu berawal dari Tauhid. Secara sederhana tauhid dapat dimaknai sebagai mengakui keesaan Sang Maha Pencipta dengan segala konsekuensi dalam bentuk apapun. Sekedar contoh, dengan memiliki tauhid yang kokoh, maka mustahil seseorang memiliki sesuatu yang dikagumi, dipatuhi, diperhatikan, ditakui, dicintai selain Allah swt itu sendiri. Oleh karena itu, apapun yang diimpikan, dipikirkan, dilakukan, diperjuangkan maka tidak pernah lepas dari kepentingan untuk menjaga tingkat ketauhidan tersebut. Tidak mungkin kemudian seseorang mengatakan yang salah itu benar dan sebaliknya, hanya semata-mata untuk mendapatkan sesuatu, dan ia yakin sepenuhnya bahwa sesuatu itu bersifat nisbi karena kemutlakan Sang Pencipta dalam memiliki dan berkehendak.

Aksioma-aksioma lainnya seperti *al-adl wal ihsan (equilibrium and benevolence)*, *al-ikhtiyar (free will)*, dan *fardh (responsibility)*, sesungguhnya lebih merupakan derivasi dari tauhid itu sendiri. Konsep-konsep ini bukan hal yang baru dalam Islam, dan juga tidak terpisah dari ajaran Islam secara keseluruhan. Manakala seseorang belajar tentang Islam, maka sesungguhnya keseluruhan konsep yang disebutkan di atas (mulai tauhid sampai dengan *responsibility*), satu demi satu sudah terurai dengan sendirinya.

Dari konsepsi dasar di atas, dapat diurai lebih jauh, bagaimana Islam memposisikan etika dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi, seperti persoalan kepemilikan sebuah properti, persoalan mana barang yang bersifat halal dan mana yang haram, mana perbuatan-perbuatan yang

diutamakan dan mana tindakan-tindakan yang dibolehkan, dianjurkan, dilarang atau dibenci. Berbagai buku etika Islami yang sementara sudah ada, menguraikan cukup rinci segala sesuatunya [lihat misalnya: Naqvi, 1994; Ahmad, 1995; Beekun, 1997; Muhammad, 2004, untuk menyebut beberapa diantaranya]

### Sosialisasi dan Implementasi

Persoalan yang ada sebetulnya bukan terletak pada formulasi etika itu sendiri, karena sebagai agama yang sangat concern dengan etika, maka etika sudah melekat sangat kuat dalam setiap inci ajaran agama Islam. Persoalan yang lebih menantang sesungguhnya adalah bagaimana etika tersebut difahami dengan baik dan kemudian diterapkan secara konsisten oleh ummat Islam khususnya dan – bilamana mungkin – menjadi contoh bagi masyarakat lainnya.

Sesungguhnya ironis bilamana ummat Islam tidak mengenal etika dan sekaligus tidak berperilaku etis. Kalaulah itu terjadi, sudah barang tentu ada kesalahan dalam pendidikan agama Islam kepada ummat selama ini. Untuk menjembatani masalah pengetahuan dan penerapan etika yang berbasis kepada Islam ini, dapat dilakukan sejumlah alternatif, misalnya:

Pertama, sosialisasi etika sejak dini, bersamaan atau secara lebih terintegrasi dengan pengajaran sisi lain agama Islam.

---

<sup>3</sup> Aksioma ini juga diacu oleh Beekun [1997] dan buku Naqvi sendiri bahkan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Anis dan Hikmat [1985].

<sup>4</sup> Dalam rumusan Beekun, ia memisahkan al-ihsan (benevolent) dari equilibrium (al-'adl), sehingga faktor kelima menurut Beekun adalah benevolent atau al-ihsan [Beekun, 1997, 21].

Mungkin selama ini pengajaran Islam dilakukan dengan mengkategorikan ilmu agama menjadi beberapa pelajaran secara terpisah. Betapapun secara metodologis pengajaran proses tersebut bersifat memudahkan, namun alangkah baiknya jika materi etika dapat selalu diintegrasikan. Bukankah Nabi Besar Muhammad SAW dengan tegas mengatakan bahwa "Aku diutus untuk menyempurnakan akhlaqul karimah". Sehingga tidaklah berguna manakala seseorang mempunyai ilmu agama yang tinggi dan bahkan mungkin sudah melakukan berbagai ritual keagamaan secara rutin, namun masih lalai dalam aspek etika.

Kedua, memperbanyak wacana etika dalam setiap kesempatan da'wah, baik secara formal oleh para muballigh atau da'i, maupun setiap Muslim yang berkesempatan, seperti para tokoh masyarakat, para pengajar atau dosen di segala lapisan atau tingkatan. Tak kalah penting dalam konteks ini adalah contoh atau teladan nyata yang dapat dilihat oleh siapapun.

Pemanfaatan media yang sangat beragam ketersediannya akhir-akhir ini – media cetak dan elektronik dengan segala variasinya – merupakan alternatif menarik lainnya untuk dicoba dalam rangka sosialisasi etika bisnis islami ini.

## Penutup

Sesuatu akan bersifat langgeng, manakala terjadi keseimbangan dan keharmonisan. Hal yang sama terjadi dalam konteks perekonomian. Sebuah harmoni tidak hanya bisa dicapai dengan sesuatu yang bersifat kuantitatif, apalagi bila diiringi dengan sesuatu yang bersifat kualitatif dalam bentuk nilai-nilai etis. Etika dengan demikian menjadi perekat erat sebuah sistem yang baik.

Etika bukan monopoli sebuah agama atau keyakinan tertentu. Tetapi yang pasti, bahwa Islam sangat dekat dan berintegrasi dengan etika. Etika Islam selain bersumber pada ajaran yang teruji dan universal, merupakan alternatif menarik yang dapat dikembangkan dan dicontoh oleh siapapun, karena memang Islam bersifat *rahmatan lil-'alamin*. Etika dalam Islam sudah mempunyai posisi yang begitu sentral, selain juga bersifat komprehensif. Persoalan yang ada dalam konteks ini, bukan lagi dalam taraf perumusan atau formulasi, tetapi lebih pada tahapan sosialisasi dan implementasi. Pada tataran ini tantangan lebih dirasakan, sehingga perlu pemikiran dalam mengatasinya sesegera mungkin. Diantara alternatif yang tampak adalah melakukan sosialisasi secara lebih dini, lebih terintegrasi dengan sosialisasi pelajaran-pelajaran keislaman lainnya. Selain itu, upaya menambah wacana dalam berbagai bentuk dan kesempatan, dan tentu saja memanfaatkan kemajuan teknologi media yang sudah semakin canggih. *Wallahu a'lam bisshowab.* ●

## Daftar Pustaka

- Anis, Husin dan Asep Hikmat (penerjemah), 1981, *Etika dan Ilmu Ekonomi, Suatu Sintesis Islami* (Naqvi, Syed Nawab Haider), Bandung: Mizan
- Ahmad, Mustaq, 1995, *Business Ethics in Islam*, Islamabad: International Institute of Islamic Thought and International Institute of Islamic Economics.
- Beekun, Rafik Issa, 1997, *Islamic Business Ethics*, Hemdon Virginia: International Institute of Islamic Thought.